

INKLUSIFISME PESANTREN DALAM MERESPON PERUBAHAN SOSIO-POLITIK DI KABUPATEN SAMPANG

Muqoffi, H. Ahmad Barizi, M. Mujaib
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: muqoffimpd@gmail.com
abarizi_mdr@uin-malang.ac.id
Mujaib66@gmail.com

Abstrak:

Perbincangan pesantren Kabupaten Sampang tidak hanya mengenai operasionalisasinya dalam dunia pendidikan secara kognitif tapi sekaligus kearifan merefleksikan dalam skala sosial termasuk eksistensinya dalam merespon transformasi sosio-politik. Karenanya, penting dilakukan penelitian untuk memahami secara holistik. Peneliti menggunakan tiga fokus, yaitu 1. Bagaimana inklusifisme pesantren dalam menyikapi gerakan politisi di Kabupaten Sampang? 2. Bagaimana inklusifisme pesantren dalam menyikapi perilaku pemilih di Kabupaten Sampang? 3. Bagaimana inklusifisme pesantren dalam menyikapi kinerja politisi pasca terpilih di Kabupaten Sampang?. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam menyikapi gerakan politisi di Kabupaten Sampang pesantren memilih sikap inklusif dalam tiga gerakan: *nyabis*, minta do'a dan memberi bantuan asalkan tidak politisasi pesantren. Dalam inklusifisme menyikapi perilaku pemilih di Kabupaten Sampang pesantren terbagi dua. *Pertama*, inklusif dengan membuka kebebasan pemilih dalam menentukan hak pilihnya sendiri. *Kedua*, eksklusif dengan memobilisasi rakyat untuk memilih sesuai dengan versi pesantren. Dalam inklusifisme menyikapi kinerja politisi pasca terpilih di Kabupaten Sampang pesantren sangat inklusif kecuali bagian kecil pesantren eks anggota Front Pembela Islam (FPI).

Kata kunci: *Inklusifisme, Pesantren, Sosio-Politik, Sampang.*

Pendahuluan

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan kiai dan mempunyai asrama sebagai tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam komplek yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Komplek ini biasanya dikelilingi tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹ Selain dalam lingkup formal, pesantren juga bersentuhan dengan persoalan informal dimana obyeknya adalah masyarakat luas, baik kaum elit maupun primitif.

¹ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3S, 1983), hlm. 18.

Kiai, ustadz, santri dan alumni yang tidak lain adalah komponen asasi struktural pesantren merupakan unit besar dari komunitas masyarakat. Karenanya, perbincangan pesantren tidak hanya mengenai operasionalisasinya dalam dunia pendidikan secara kognitif tapi sekaligus kearifannya merefleksikan dalam dunia sosial termasuk eksistensinya dalam merespon transformasi sosio-politik.

Banyak peneliti yang tertarik memilih pesantren sebagai obyek kajian dan riset menyangkut relasinya dengan problematika masyarakat, diantaranya adalah 1). Inklusivisme dan humanisme pesantren yang ditulis oleh Zulkifli Nelson dan Dardiri. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa internalisasi sikap inklusivisme dan humanisme pesantren tertanam dengan baik, mengikis isu bahwa hanya pemahaman agamanyalah yang paling benar yang implikasinya memunculkan teror dan pembunuhan atas nama Tuhannya.² 2). Sinergi pendidikan pesantren dan kepemimpinan dalam pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari. Penelitian konseptual dimana kajiannya hanya bermuara pada tataran teoretis.³ 3). Kekuasaan juragan dan kiai di Madura. Fokus meneliti gerakan politik juragan dengan kekuatan ekonominya dan kiai dengan keagamaannya untuk merebut kekuasaan.

Dengan demikian, judul inklusivisme pesantren dalam merespon perubahan sosio-politik di Kabupaten Sampang sengaja dipilih sebagai bahan penelitian untuk mengakomodir aspek penting yang belum digali dan dikaji oleh peneliti lain dan praktisi pendidikan, khususnya diskursus sosio-politik di Kabupaten Sampang yang memberi keunikan dan kekhasan tersendiri sebagai kabupaten kota penentu kemenangan dalam kontestasi perpolitikan Jawa Timur pada tahun 2018.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berusaha memahami makna di balik fenomena sosio-politik yang muncul secara holistik. Teknik penggalan data menggunakan observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴ Karena itu, peneliti langsung melakukan observasi lapangan untuk menggambarkan, menjelaskan, menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antara berbagai variabel dalam fenomena.⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Inklusivisme Menyikapi Gerakan Politik Di Kabupaten Sampang

Inklusif adalah sikap berfikir terbuka dan menghargai perbedaan, baik perbedaan tersebut dalam bentuk pendapat, pemikiran, etnis, tradisi berbudaya hingga perbedaan agama. Sikap terbuka kemudian menjadi prasyarat utama terjadinya dialog antar agama, tradisi atau dialog antar peradaban dengan tujuan tidak lagi ada pembenaran absolut dan ekstrim dalam berpendapat ataupun beragama, namun bukan hal ini yang dimaksud oleh

² Zulkifli Nelson dan Dardiri, "Inklusivisme dan Humanisme Pesantren," *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama*, (Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016), hlm. 134.

³ Zaini Tamin AR, "Pesantren dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Volume 3 Nomor 2 November 2015), hlm. 324.

⁴ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

⁵ Zainal Arifin, *Penelitian dan Pendidikan Metode dan Paradigma baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 41.

penulis sebagai paradigma inklusif, melainkan sebuah tujuan untuk menemukan kebenaran universal dalam setiap perbedaan atau sekedar tidak saling mencurigai.⁶

Dalam bidang teologi, inklusif ialah pandangan keberagamaan yang menganggap bahwa di luar agama yang dianutnya terdapat kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Secara substansial, paham keberagamaan inklusif artinya percaya bahwa seluruh kebenaran agama lain ada juga dalam agama kita. Teologi inklusif dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atau wawasan yang terbuka, luwes, dan toleran.⁷ Dengan teologi ini kita dituntut menyikapi segala bentuk perbedaan dengan baik, bijak, dan tulus sebagai sarana *fastabiq al-khairat*. Percaya bahwa menghargai keberadaan orang lain dan segala perbedaannya tidak otomatis menghilangkan eksistensi diri (agama).⁸

Teologi inklusif, dapat disebut sebagai “teologi perdamaian/teologi kerukunan beragama”, baik di dalam satu agama tertentu maupun antara satu agama dengan agama lainnya. Inklusivisme beragama merupakan sikap keterbukaan dalam berpikir positif dan saling menghargai segala perbedaan. Sikap tertutup (eksklusivisme) yang berlebihan hanya akan menyuburkan ketidaktentraman dan disharmonitas masyarakat. Sehingga diperlukan pembangunan bersama sikap inklusif. Agama tidak boleh dijadikan pembatas interaksi sesama umat manusia. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan.⁹ Sikap inklusif diimplementasikan agar makna Islam dalam masyarakat muslim tidak berwujud dalam pemikiran yang tertutup. Mewujudkan sikap muslim yang mengakomodir keberagaman tetapi tidak menghilangkan identitas Islam itu sendiri. Berdasarkan tataran kehidupan sosial memiliki tujuan dan ideologi yang sama.

Berbicara inklusifisme dalam merespon gerakan politisi, peneliti dapat memaparkan bahwa pesantren di Kabupaten Sampang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang fundamental dalam merespon gerakan masif yang gencar dilakukan oleh elit politik yang memproklamirkan diri sebagai peserta pemilihan umum. Opini masyarakat yang menempatkan politisi sebagai kluster yang buruk dan kapitalis tidak memberi pengaruh inheren kepada pesantren di Kabupaten Sampang untuk menjustifikasi negatif terhadap gerakan politik yang dilakukannya kepada kiai pesantren dalam sebagian bentuk dan polanya, yaitu:

1. *Nyabis*. *Nyabis* merupakan istilah Madura yang familiar di kalangan pesantren untuk aktivitas silaturahmi yang dilakukan alumni pesantren dan simpatisan kepada kiai. Kendati aktivitas ini terjadi menjelang pesta demokrasi dan diprakarsai oleh calon pemimpin, pesantren lebih memilih sikap inklusif menerima kunjungannya.
2. Mohon do'a. Tangan yang ditengadahkan para calon untuk mendapat dukungan do'a dari kiai pesantren pada lazimnya diterima dan dilayani. Do'a kebaikan atau do'a kemenangan selama mampu amanah dipanjatkan oleh kiai dengan penuh *khudhu'* dan *khusyu'*. Meskipun spirit para calon masih dipertanyakan antara faktor religiutas do'a atau justru politisasi kiai untuk meningkatkan elektabilitasnya.
3. Memberi bantuan. Memberi bantuan kepada pesantren yang dilakukan elit politik seringkali dimaknai sebagai manuver politik oleh khalayak, bahkan diklaim sebagai

⁶ Zulkifli Nelson & Dardiri, “Inklusivisme dan Humanisme Pesantren,” *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama*, (Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016), hlm. 157.

⁷ MK Ridwan, “Pemikiran Teologi Inklusif Nurcholish Madjid”, *Akademia, Accelerating The World's Research*, hlm. 9.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid., hlm. 10.

risywah untuk mendapat simpati kiai. Isu *meney politic* yang seringkali menjadi propaganda pihak lawan ini tidak merubah pemikiran pesantren dalam bersikap inklusif.

Sikap inklusifisme ini banyak ditunjukkan oleh kiai sepuh di Kabupaten Sampang, seperti KH. Zainal Abidin, pengasuh Pondok Pesantren Gedangan, dan KH. Syafiuddin Abd. Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, meskipun politisi yang datang memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk kelompok elit yang tidak dikenali rekam jejaknya. Merupakan tindakan bijaksana yang mencerminkan pemahaman yang holistik seorang kiai perihal etika relasi pesantren dengan pemerintah, khususnya dalam hal mendo'akan. Al-Qadli 'Iyadl sebagaimana dikutip bin Khalaf al-Barbahari menyebutkan:

إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوًى، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلْسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ

Artinya: Kalau kamu melihat seseorang mendo'akan buruk kepada pemerintah, maka ketahuilah bahwa dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau kamu melihat seseorang mendo'akan pemerintah dengan baik, maka ketahuilah bahwa dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw.¹⁰

Tapi sikap inklusifisme pesantren tersebut tidak bebas nilai. Masih terikat dengan kode etik dan ketentuan normatif yang tidak boleh dilanggarnya, yaitu tidak mempolitisasi pesantren bagi pesantren yang dinahkodai oleh kiai kultural: kiai yang tidak memanfaatkan kedigdayaannya sebagai pemimpin ummat untuk kepentingan politik praktis, dimana bagi mereka mengasuh santri di pesantren menjadi tanggung jawab utama.¹¹

2. Inklusifisme Menyikapi Perilaku Pemilih Di Kabupaten Sampang

Pesantren di Kabupaten Sampang terbagi kepada dua kelompok besar, yaitu *pertama*: memilih pasif dalam merespon ufuria masyarakat dalam memilih calon pemimpin daerah dan desa. Pesta demokrasi 5 tahunan menjadi momentum rakyat akar rumput untuk menentukan pilihan sesuai versinya tanpa intervensi dari kiai pesantren. Kendati kategorisasi lebih baik calon perspektif pesantren itu ada namun tidak melakukan eksposur kepada khalayak agar mengikuti hasil telaahnya. Bagi pemegang kendali kekuasaan pesantren, sikap inklusif dengan menerima perbedaan pandangan dalam menentukan calon kelas daerah dan desa adalah lebih baik. Cara seperti ini sebagaimana pendapat Gus Amin Syafiuddin sangat objektif dalam menjaga stabilitas rakyat dan menghindari gesekan dan disintegrasi yang notabene menjadi cikal bakal terjadinya kontak fisik antarmasyarakat. Sebagai wakil pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Gus Amin Syafiuddin seringkali memberi wejangan kepada masyarakat dibawah garis komandonya untuk tidak mengambil hati perhelatan pesta demokrasi tersebut, jika hanya skala desa dan daerah, seperti Pilkades, pemilihan DPRD, Pilbup dan semacamnya.

¹⁰ Bin Khalaf al-Barbahari, *Syarh al-Sunnah*, (Riyadl: Maktabah Dar al-Minhaj, 1426 H.), hlm. 116.

¹¹ Merlia Indah Prastiwi, "Politisasi Pesantren Dan Pergeseranfungsi Pesantren Di Madura," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, (Vol. 23No. 2, Desember 2015), hlm. 215.

Tipologi berpikir yang dikembangkan ini menurut hasil riset M. Imam Zamroni sekaligus dapat menyelematkan seorang kiai dari memudarnya kharisma di mata rakyat.¹² Namun sebenarnya dampak ini terjadi jika intervensi kiai dalam kancah perpolitikan dilatari dengan motif ekonomi yang dilakukan oleh kiai yang kesadaran dan visi keagamaannya sudah mengalami profanisasi. Sebagaimana hasil kajian Abdur Rozaki bahwa kiai dengan tipe seperti itu benar adanya. Dia mengesampingkan kesadaran keagamaan yang lebih mengutamakan dimensi bersifat Ilahiah dan dasar keimanan untuk memperkuat spiritualitas-transendental dalam realitas sosial kemasyarakatan. Sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan dunia yang profan (*world profan*).¹³

Pesantren kelompok *kedua*: memilih sikap aktif dalam memobilisasi pemilih untuk menentukan calon pemimpin yang diinginkan pesantren. Sikap inklusifisme dalam pesantren tipe ini tidak terjadi, karena di bawah kekuasaan kiai, para pemilih tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan yang terbaik menurut penilaiannya. Sikap eksklusifisme ini menjadi pemandangan yang lazim dijumpai di pesantren besar dan menengah di Kabupaten Sampang, seperti 1. Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang yang diprakarsai KH. Muhammad bin Muafi, 2. Pondok Pesantren Nurul Jadid Garduak Lepelle Robatal Sampang atas pimpinan KH. Mudassir Sijo, 3. Pondok Pesantren Al-Ihsan Jrangoan Omben Sampang yang dipimpin KH. Mahrus Malik dan 4. Pondok Pesantren Gedangan Daleman Kedungdung Sampang yang diprakarsai KH. Abd. Wahhab.

Keterlibatan kiai pesantren kelompok kedua dalam panggung perpolitikan tidak menjadi faktor determinan dekradasinya kharisma dan reputasi kiai sebagai figur yang disegani dalam sosial masyarakat. Bahkan menjadi nilai surplus akan superioritas pesantren dalam kancah sosial, dimana posisinya tidak hanya sebagai pemimpin formal tapi sekaligus menjadi pemimpin informal (*informal leaders*) yang bertugas menata pola hidup masyarakat bukan justru didekti untuk mengikuti hasrat rakyat yang tidak sejalan dengan koridor agama.

Menurut Tidjani Djauhari, Pondok Pesantren memiliki 2 misi sebagai berikut:

- a. Pondok Pesantren sebagai pendidikan ummat secara umum. Pada bidang ini, tugas Pesantren adalah mendidik dan menyiapkan pemuda-pemudi Islam untuk menjadi ummat berkualitas dalam berbagai bidang dan bukan saja mampu mengintaskan mereka dari jurang kebodohan dan keterbelakangan, tapi juga mampu melaksanakan misi amar makruf nahi munkar.
- b. Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan pengkaderan ulama *agent of excellence* dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Dalam hal ini, tugas Pesantren adalah mendidik dan menyiapkan *thâifah mutafaqqihah fî al-dîn*, yaitu kader-kader ulama pengasuh Pesantren yang mampu mewarisi sifat dan kepribadian para Nabi serta siap melaksanakan tugas *indzâr al-Qaum*.¹⁴

Memang benar perbedaan adalah keniscayaan dan *sunnatullah* yang tidak bisa disangkal eksistensinya. Secara implisit, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

¹² M. Imam Zamroni, "Kekuasaan Juragan dan Kiai Di Madura," Karsa, *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, (Vol. XII No. 2 Oktober 2007), hlm. 175

¹³ Abdur Rozaki, *Menabur Karisma, Menuai Kuasa*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2021), hlm. 187.

¹⁴ Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren, Agenda yang Belum terselesaikan*, (Jakarta: Taj Publishing, 2008), hlm. 86.

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya saya menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saya menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal.¹⁵

Namun bukan berarti menutup kebebasan santri dan alumni dalam menggunakan hak pilihnya merupakan tindakan yang salah, apalagi dikategorikan tindakan hirarkis dan vertikal antarmanusia yang keliru. Sebagaimana digagas oleh Mohammad Irfan dan Mastuki bahwa hubungan sesama manusia secara hirarkis dan vertikal itu dilarang lantaran bubungan semacam ini akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kemanusiaan, akan melahirkan jiwa yang kerdil, yakni perilaku robotisme yang hanya menuruti perintah dengan mengabaikan kepekaan nurani serta daya nalarnya. Hak asasi yang telah diamanatkan Allah Swt dan telah menjadi atribut kemanusiaannya yang membedakan dengan makhluk-makhluk lain untuk diaktualisasikan melalui kerja-kerja kemanusiaan akhirnya dizalimi dan diingkarinya sendiri.¹⁶

Gagasan Mohammad Irfan dan Mastuki ini tidak relevan menjadi rujukan menghakimi salah terhadap tindakan eksklusivisme pesantren. Karena pada esensialnya kesalahan tindakan hirarkis dan vertikal antarmanusia itu jika muaranya pada praktik yang amoral. Sedangkan eksklusivisme pesantren dalam mengkondisikan pilihan rakyat adalah alternatif terakhir untuk menghindari pilihan yang salah dan penguasa yang tidak amanah. Bagi kiai pesantren itu adalah langkah taktis untuk melawan *money politic* yang dimainkan oleh *blater* dan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam kontestasi perpolitikan.

Perbedaan memang keniscayaan tapi praktik implementasinya harus dimajaj dengan tepat. Muhammad Sayyid Thanthawi menjelaskan bahwa perbedaan bangsa dan suku itu untuk saling mengenal garis keturunan antara satu dengan yang lain, saling berkesinambungan, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling membanggakan keturunan, nasab dan pangkatnya.¹⁷

3. Inklusifisme Menyikapi Kinerja Politik Pasca Terpilih Di Kabupaten Sampang

Banyak masyarakat yang bersikap skeptis dalam menyikapi kinerja pemimpin daerah. Pembangunan daerah yang dioperasikan oleh penentu kebijakan tidak kemudian mendapat apresiasi dari rakyat, khususnya mereka yang memposisikan diri sebagai oposisi penguasa. Tujuan pragmatisme politik seringkali dialamatkan kepada mereka meski hanya bersifat spekulatif bukan berdasarkan bukti autentik.

Namun itu tidak terjadi pada kiai pesantren. Bagi mereka, setiap pencapaian yang ditorehkan oleh pemimpin daerah harus disyukuri dan diapresiasi. Karena otoritas manusia hanya bisa menilai berdasarkan dzahirnya bukan sesuatu yang bersifat abstrak. Niat dan tujuan yang notebene adalah olah hati, tidak benar divisualkan dengan nilai-nilai yang buruk. Manfaat berprasangka baik lebih berguna dari pada sebaliknya. Apalagi dalam konteks pemerintahan dimana implikasi buruknya tidak hanya bersifat pribadi tapi menyangkut komunitas besar.

Inklusifisme pesantren dalam aspek ini meluas menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan program kerja serta pelaksanaannya. Harmonisasi dan sinergitas

¹⁵ Al-Qur'an, al-Hujurat: hlm. 19.

¹⁶ Mohamad Irfan dan Mastuki, *Teologi Pendidikan, Tauhid Sebagai Pradigma Pendidikan Islam*, (t.t.: Friska Agung Insani, 2008), hlm. 117.

¹⁷ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir Thanthawi*, (t.t.: Mathba'ah al-Sa'adah, 1986), hlm. 196-197.

pemerintah dan pesantren berjalan dengan baik dalam beberapa kegiatan meski pemerintah setempat bukan kontestan pemilu yang dijagokan sebelumnya, seperti upacara hari santri nasional yang dapat dilaksanakan pemerintah di pesantren dan pelayanan vaksinasi Covid-19 sekalipun program ini sulit diterima oleh masyarakat seiring dengan masifnya isu dan hoax yang beredar namun melalui kerja sama pesantren dapat direalisasikan dengan baik dan capaian target dapat terpenuhi.

Bagi pesantren di Kabupaten Sampang, pemerintah adalah mandat yang sakral dimana kewajiban mengikuti undang-undangnya harus diperhatikan. Boleh beda pandangan dalam pesta demokrasi tapi siapapun pemanangnya maka dia atasan yang harus dihormati. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ أُكْرِمَهُ أُكْرِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ

Artinya: Pemimpin adalah bayangan Allah di bumi. Barangsiapa memuliakannya, berarti memuliakan Allah dan barangsiapa yang menghina berarti menghina Allah.¹⁸

Kecuali pesantren eks anggota Front Pembela Islam (FPI) banyak yang lebih memilih tidak bekerja sama untuk mensukseskan program pemerintah khususnya pelayanan vaksinasi Covid di semua variannya.

Penutup

Inklusif adalah sikap berfikir terbuka dan menghargai perbedaan, baik perbedaan tersebut dalam bentuk pendapat, pemikiran, etnis, tradisi berbudaya hingga perbedaan agama. Dalam penelitian inklusifisme pesantren dalam menyikapi perubahan sosio-politik, peneliti menelaah 3 komponen asasi, yaitu 1. Inklusifisme dalam menyikapi gerakan politisi di Kabupaten Sampang. Dalam hal ini pesantren memilih inklusif setidaknya dalam tiga gerakan: *nyabis*, minta do'a dan memberi bantuan asalkan tidak politisasi pesantren, 2. Inklusifisme menyikapi perilaku pemilih di Kabupaten Sampang. Dalam hal ini pesantren terbagi dua. *Pertama*, inklusif dengan membuka kebebasan pemilih dalam menentukan hak pilihnya sendiri. *Kedua*, eksklusif dengan memobilisasi rakyat untuk memilih sesuai dengan versi pesantren, 3. Inklusifisme menyikapi kinerja politisi pasca terpilih di Kabupaten Sampang. Dalam hal ini inklusifisme pesantren sangat terlihat kecuali bagian kecil pesantren eks anggota Front Pembela Islam (FPI).

Daftar Pustaka

- Abdur Rozaki. *Menabur Karisma, Menuai Kuasa*. (Yogyakarta: IRCISoD, 2021).
- Al-Barbahari, Bin Khalaf. *Syarh al-Sunnah*. (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1426 H.).
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *al-Tanwīr Syarh al-Jāmi' al-Shaghīr*, Vol. II, (Riyadh: Dar al-Salam, 2011).
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Djauhari, Mohammad Tidjani. *Masa Depan Pesantren, Agenda yang Belum terselesaikan*. (Jakarta: Taj Publishing, 2008).

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *al-Tanwīr Syarh al-Jāmi' al-Shaghīr*, Vol. II, (Riyadh: Dar al-Salam, 2011), hlm. 71.

- M. Imam Zamroni. "Kekuasaan Juragan dan Kiai Di Madura," *Karsa, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*. (Vol. XII No. 2 Oktober 2007).
- Merlia Indah Prastiwi. "Politisasi Pesantren Dan Pergeseranfungsi Pesantren Di Madura," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, (Vol. 23No. 2, Desember 2015).
- MK Ridwan. "Pemikiran Teologi Inklusif Nurcholish Madjid". *Akademia, Accelerating The World's Research*.
- Mohamad Irfan dan Mastuki. *Teologi Pendidikan, Tauhid Sebagai Pradigma Pendidikan Islam*. (t.t.: Friska Agung Insani, 2008).
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. *Tafsir Thanthawi*. (t.t.: Mathba'ah al-Sa'adah, 1986).
- Zainal Arifin. *Penelitian dan Pendidikan Metode dan Paradigma baru*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012).
- Zaini Tamin AR. "Pesantren dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. (Volume 3 Nomor 2 November 2015).
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta: LP3S, 1983).
- Zulkifli Nelson & Dardiri. "Inklusivisme dan Humanisme Pesantren," *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama*. (Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016).